LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGADUAN MASYARAKAT



BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan BPS Provinsi Kepulauan Riau merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kredibilitas BPS Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan data yang terpercaya dan tepat waktu.

Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan BPS Provinsi Kepulauan Riau, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang tebaik kepada masyarakat.

BPS Provinsi Kepulauan Riau telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai penghasil data yang berkualitas dan terpercaya, BPS Provinsi Kepulauan Riau menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat Triwulanan IV adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Unit Pengaduan Masyarakat. Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat Triwulan IV adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Tim Unit Pengaduan Masyarakat BPS Provinsi Kepulauan Riau untuk ditindaklanjuti.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat ini adalah:

1. Melakukan monitoring terhadap upaya pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat yang masuk kotak pengaduan maupun web pengaduan serta tindak lanjut penanganan yang telah dilakukan oleh Tim Unit Pengaduan Masyarakat BPS Provinsi Kepulauan Riau selama setiap bulan dalam kurun waktu triwulan berjalan. Melakukan evaluasi terhadap penanganan dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Tim Unit Pengaduan Masyarakat BPS Provinsi Kepulauan Riau serta merumuskan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil evaluasi setiap bulan dalam kurun waktu triwulan berjalan.

D. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tahmbahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
- 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Kepala Badan Pusat Satistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tim Pelaksana

Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat ini dilakukan oleh Tim Unit Pengaduan Masyarakat yang telah disahkan dalam SK Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04/PM/2024 tentang Tim Unit Pengaduan Masyarakat.

B. Tempat dan Waktu Kegiatan

Penanganan pengaduan masyarakat ini dilaksanakan setiap bulan dengan laporan rutin setiap triwulanan di seluruh wilayah kerja BPS Provinsi Kepulauan Riau.

C. Saluran Pengaduan Masyarakat

Bentuk saluran pengaduan yang terdapat di BPS Provinsi Kepualauan Riau adalah sebagai berikut:

Melalui kotak pengaduan yang terdapat di lantai 1 BPS Provinsi Kepulauan Riau yang terdapat di ruangan Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Selain melalui kotak pengaduan, dapat membuat pengaduan melalui Facebook, Instagram, aplikasi pengaduan (http://www.lapor.go.id/).

D. Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tim Unit Pengaduan Masyarakat BPS Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewajiban untuk melaksanakan penanganan seluruh aduan dari masyarakat terkait informasi keterbukaan publik. Secara umum, aduan yang masuk selama Januari–Desember 2024 adalah nihil dan berikut disajikan berdasarkan tabel:

No	Periode	Jumlah Pengaduan Berdaasarkan Jenis Pengaduan				
		Fraud	Kepegawaian	Layanan Statistik	Pelayanan Umum	
1	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
2	Februari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
3	Maret	Nihil	Nihil	Nihil	1	
4	April	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
5	Mei	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
6	Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

No	Periode	Jumlah Pengaduan Berdaasarkan Jenis Pengaduan				
		Fraud	Kepegawaian	Layanan Statistik	Pelayanan Umum	
7	Juli	Nihil	Nihil	Nihil	1	
8	Agustus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
9	September	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
10	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
11	November	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
12	Desember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
Total		Nihil	Nihil	Nihil	2	

BAB III MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT

A. Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengaduan Masyarakat

Tim Unit Pengaduan Masyarakat BPS Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewajiban untuk melaksanakan penanganan seluruh aduan dari masyarakat terkait informasi keterbukaan publik. Secara umum, aduan yang masuk selama bulan Januari–Desember 2024 adalah sebagai berikut.

No	Periode	Jumlah Pengaduan Berdaasarkan Jenis Pengaduan				
		Fraud	Kepegawaian	Layanan Statistik	Pelayanan Umum	
1	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
2	Februari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
3	Maret	Nihil	Nihil	Nihil	1	
4	April	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
5	Mei	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
6	Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
7	Juli	Nihil	Nihil	Nihil	1	
8	Agustus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
9	September	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
10	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
11	November	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
12	Desember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
Total		Nihil	Nihil	Nihil	2	

Berdasarkan hasil rekap dari beberapa saluran pengaduan seperti kotak pengaduan, web pengaduan, dan email pengaduan, tidak didapatnya pengaduan masyarakat terhadap BPS Provinsi Kepulauan Riau. Tim Unit Pengaduan Masyarakat BPS Provinsi Kepulauan Riau melakukan rapat monitoring dan evaluasi untuk membuat laporan bulanan sebagai bukti pertanggungjawaban.

B. Tindak lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan hasil rekapan dari media pengumpulan laporan pengaduan masyarakat yang digunakan (kotak saran, Facebook, Instgram, Email, Aplikasi Pengaduan (http://www.lapor.go.id/) ataupun berkunjung langsung ke kantor BPS Provinsi Kepulauan Riau. Berikut rekapitulasi monitoring hasil penanganan masyarakat yang telah di tindaklanjuti sebagai berikut (Hasil tindak lanjut di lampiran):

No	Periode	Solusi	Tindak Lanjut	Evaluasi
1	Januari	Nihil	Nihil	Nihil
2	Februari	Nihil	Nihil	Nihil
3	Maret	1	1	1
4	April	Nihil	Nihil	Nihil
5	Mei	Nihil	Nihil	Nihil
6	Juni	Nihil	Nihil	Nihil
7	Juli	1	1	1
8	Agustus	Nihil	Nihil	Nihil
9	September	Nihil	Nihil	Nihil
10	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil
11	November	Nihil	Nihil	Nihil
12	Desember	Nihil	Nihil	Nihil
	Total	2	2	2

BAB IV PENUTUP

BPS Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat tahun 2024 ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan pengawasan dan perbaikan kualitas pelayanan public di lingkungan BPS Provinsi Kepulauan Riau. Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami terhadap Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat.

Ketua Pilar Pengawasan

BRS Provinsi Kepulauan Riau

Dian Kartika Sari, SST., M.Si.

LAMPIRAN













